

BAB VII

PENUTUP

7.1 Analisis

Landasan konseptual dalam penelitian ini menggunakan tiga konsep utama, yaitu ekonomi politik kebijakan publik, kontra-hegemoni, dan kepengaturan (*governmentality*). Selain itu perspektif marxis dan de-kolonial juga digunakan untuk membantu menganalisa temuan-temuan di lapangan. Namun penting dicatat berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini bukan sebagai doktrin atau ideologi yang kebenarannya hendak dibuktikan atau dipertahankan, akan tetapi konsep dan teori tersebut digunakan sebagai alat bantu analisis. Artinya penelitian ini tidak sedang menyekat studinya dalam batasan-batasan tertentu yang dapat mendistorsi temuan-temuan atau realitas di lapangan.

Konsep ekonomi politik kebijakan publik dalam penelitian ini digunakan sebagai alat bantu untuk melihat dan mengurai dinamika kebijakan pembangunan pabrik semen di Pati. Melalui pendekatan ekonomi politik kebijakan publik marxis peneliti mengurai permasalahan dibalik lahirnya kebijakan pembangunan pabrik semen yang ditentang mayoritas masyarakat. Dengan pendekatan ini peneliti mencoba mengurai tentang mengapa dua bupati yang berbeda (Bupati Tasiman & Bupati Haryanto) dan dua gubernur yang berbeda (Gubernur Bibit Waluyo & Gubernur Ganjar Pranowo) sama-sama memiliki corak kebijakan yang sama yaitu untuk mengeksploitasi Pegunungan Kendeng Utara. Melalui hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa tidak ada pilihan rasional yang independen dan objektif yang dilakukan oleh para *stakeholders* seperti Bupati Pati dan

Gubernur Jateng ini. Pilihan kebijakan yang diputuskan tidak berdiri diruang hampa akan tetapi diantara struktur sosial yang objektif dan diantara tarik ulur antara berbagai kepentingan yang beragam serta idiologi politik yang dipegang. Konflik pembangunan pabrik semen di Pati ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dibangun diatas pondasi perspektif neoliberalisme yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, kebebasan berinvestasi, dan pembangunan dari perpsektif kelas atas. Sementara, para perumus kebijakan menentukan pilihan kebijakannya berdasarkan idiologi mereka.

Idiologi neoliberal ini pada kenyataannya menyimpan kontradiksi yang tidak sejalan dengan teorinya. Neoliberalisme yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam realitas yang terjadi cenderung meneguhkan kekuasaan kelas elit. Kondradiksi berikutnya adalah bahwa negara neoliberal yang diharapkan hanya menjadi penonton dan anjing penjaga, namun disisi yang lain negara diwajibkan berperan aktif dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan menghalau hambatan-hambatan dalam ekspansi kapital. Di Pati peran negara menjadi pendorong utama berjalannya ekspansi kapital pabrik semen salah satunya dengan cara berupaya meredam perlawanan rakyat. Neoliberalisme yang berjalan di Negara pinggiran seperti Indonesia ini juga cenderung transaksional dan tidak stabil, apalagi ditengah lemahnya gerakan progresif yang sebelumnya dihancurkan paska 1965. Ketika ajang pemilihan umum tiba, para calon saling berkampanye mengobral janji dan politik muka dua. Haryanto ketika pilkada Pati 2012 menjalankan politik transaksional dengan berkampanye bahwa dia ketika terpilih akan membatalkan pembangunan pabrik semen di Pati. Namun setelah terpilih, alih-alih membatalkan, dia kemudian menjadi orang terdepan yang

mendorong ekspansi PT SMS di Pati. Realitas tersebut akan terdistorsi ketika dilihat dalam kaca mata moral. Dengan pendekatan ekonomi politik kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Haryanto tersebut adalah politik transaksional untuk meraih kekuasaan⁸⁶. Apapun obralan janjinya pilihan politik yang digunakan setelah terpilih akan tetap idiologi *status-quo* yaitu neoliberalisme. Dengan idiologi itu yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya.

Pendekatan kontra-hegemoni dalam penelitian ini digunakan untuk mengurai tentang bagaimana dan mengapa masyarakat bergerak untuk melawan kebijakan pembangunan pabrik semen. Masyarakat di Kawasan Pegunungan Kendeng Utara – Pati yang selama hampir setengah abad tidak memiliki imajinasi dan kapasitas pergerakan dalam bidang politik, tiba-tiba mengorganisir diri untuk membentuk gerakan sosial. Melalui pisau analisis kontra-hegemoni peneliti memaparkan bahwa itu terjadi karena masyarakat menilai keberlangsungan hidup mereka akan terancam dengan adanya pembangunan pabrik semen di ruang hidup mereka. Hegemoni dari penguasa yang diinternalisasi kemasyarakat kemudian mendapat titik pembalikan berupa perlawanan. Ketidakpercayaan terhadap kebijakan pembangunan pabrik semen mengalir menjadi deligitimasi kekuasaan pemerintah.

Pendekatan Gramsci dipilih peneliti karena ia peka terhadap konstelasi kekuasaan, dinamika perlawanan, terbentuknya gerakan sosial, dan keruwetan

⁸⁶ Ketiadaan basis massa yang berperan aktif telah membonsai demokrasi dan menegaskan pola elitis dalam pemerintahan. Para elit bisa saja menjalankan kebijakan untuk keuntungan dirinya dan kelompoknya, walaupun itu bertolak belakang dengan janji-janji dan mengorbankan masyarakat. Pengambilan keputusan yang bersifat elitis ini memiliki keselarasan dengan praktik kebijakan neoliberal.

terhadap sengkarut politik yang terjadi. Dengan alat bantu kontra-hegemoni peneliti melihat terbentuknya gerakan sosial yang dimulai dengan lahirnya kelompok sosial yang mengenali kepentingan bersama untuk membingkai aspirasi dan tuntutan secara kolektif. Keresahan-keresahan yang terjadi ditengah masyarakat akibat rencana pembangunan pabrik semen kemudian terjaring dalam organisasi-organisasi pergerakan yang menjadi kendaraan perjuangan penolakan pabrik semen. Untuk menguatkan perlawanan dan disisi lain menjalankan pendidikan politik maka organisasi pergerakan berjejaring dengan para aktivis, LSM, dan organisasi pergerakan yang lain. Gerakan kontra-hegemoni ini berupaya membangun hegemoni progresif untuk menentang hegemoni penguasa dengan dibantu oleh para intelektual organik. Upaya tersebut terus berlangsung sampai sekarang. Sementara disisi yang lain dengan pendekatan Gramsci peneliti berupaya menganalisis dinamika terciptanya perpecahan didalam organisasi JMPPK yang melahirkan LIKRA hingga terbentuk berbagai aliansi lain seperti AAWK dan ARKB.

Sedangkan pendekatan dari Foucault digunakan peneliti sebagai pisau analisa dalam mengungkap bagaimana modus kekuasaan bekerja dan praktik-praktik kepengaturan ulang untuk membentuk hegemoni dari penguasa kembali. Dengan pendekatan ini peneliti memaparkan praktik politik yang begitu beragam hingga pembentukan kuasa diskursif melalui diskursus dan wacana untuk mencari konsesus dari masyarakat agar menyetujui pembangunan pabrik semen. Penguasa-pengusaha berupaya melingkari kesadaran masyarakat dengan berbagai wacana-wacana kebaikan pabrik semen. Disisi yang lain praktik pendisiplinan yang berjejalin dengan kepengaturan telah membentuk tindakan-tindakan koersif dalam

menyikapi ketidakmampuan penguasa-pengusaha dalam membentuk kembali hegemoni mereka. Praktik-praktik tersebut dijelaskan secara gamblang dalam penelitian ini.

Sementara dengan menggabungkan pendekatan Gramsci dan Foucault sebagai pisau analisa, peneliti mampu untuk mengurai dinamika pertarungan yang terjadi antara penguasa-pengusaha melawan gerakan kontra-hegemoni. Pertarungan tersebut terjadi tidak hanya dimedan diskursif akan tetapi dalam praktik-praktik keseharian dan dalam berbagai aksi yang dilakukan.

7.2 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa proses akumulasi kapital dan ekspansi spasial dari kapitalisme pasti dihadapkan dengan batasan alam (ruang, tempat, ekosistem dan lingkungan) yang pada kasus di Pati telah menciptakan perlawanan dari masyarakat (Marx, 2004; Harvey, 2010; Gorz, 2005). Penolakan dari masyarakat kontra terhadap kebijakan pembangunan pabrik semen tidak bisa dilepaskan dari upaya mereka untuk menjaga dan mempertahankan faktor keberlangsungan hidup. Masyarakat kontra menilai pembangunan pabrik semen hanya akan menjadi ancaman bagi kehidupan mereka dibanding memberikan dampak transformatif. Nilai, norma, budaya, dan kepercayaan masyarakat dalam melihat Pegunungan Kendeng Utara mengkondisikan pemaknaan wilayah tersebut sebagai ruang yang direlaskan pada nilai kehidupan dan ikatan sosial. Pegunungan Kendeng Utara dimaknai tidak hanya sebagai kawasan perbukitan, namun juga sebagai ruang penopang hidup masyarakat, sehingga ketika ruang

tersebut tengah dalam ancaman, masyarakat kontra meresponnya dengan penolakan hingga perlawanan.

Kebijakan pemerintah untuk merealisasikan proyek pembangunan pabrik semen mendapatkan tanggapan yang berbeda dari masyarakat kontra. Klaim-klaim bahwa kebijakan tersebut merupakan kehendak pemerintah untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya bagi masyarakat kontra terselip kehendak utama yaitu untuk mengeksklusi, menjarah sumber daya alam, merusak keanekaragaman hayati, memarginalisasi, mendorong ketimpangan, perampasan ruang keberlangsungan hidup, pengebirian demokrasi, dan penghancuran kebudayaan serta kepercayaan lokal. Kebijakan pembangunan pabrik semen di Pati tersebut penuh dengan upaya pemaksaan kehendak. Penolakan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat⁸⁷ tidak membuat pemerintah memikirkan ulang untuk menghentikan kebijakan tersebut. Namun melalui berbagai praktik-praktik politis (baik dengan kuasa diskursif dan koersif), Pemerintah & pabrik semen (PT SG & PT SMS) menjalankan berbagai upaya untuk mendapat konsesus dari masyarakat, walaupun itu harus dibayar dengan munguatnya konflik-konflik ditengah masyarakat.

Kebijakan pemaksaan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati telah memunculkan krisis dan batasan kepengaturan yang berimbas pada semakin menguatnya ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap pemerintah. Kekuasaan yang dahulu dialami sebagai hal yang samar-samar atau bahkan tidak dirasakan sama sekali, kini menjadi sasaran kesadaran kritis (Li, 2012). Aksi-aksi kolektif

⁸⁷ Sebagaimana penelitin Tim Amdal PT SMS yang menunjukan bahwa 67% masyarakat menolak pembangunan pabrik semen, 20% menerima, sedangkan 13% tidak menjawab (Lihat AMDAL PT SMS)

seringkali digunakan untuk menentang sikap penguasa yang dianggap melenceng. Batasan dalam kepengaturan, menjadikan kuasa hegemonik (penguasa-pengusaha) melakukan kepengaturan ulang. Melalui kepengaturan ulang kuasa hegemonik hendak membangun kembali legitimasi kekuasaan mereka dan yang paling utama adalah untuk merealisasikan proyek pembangunan pabrik semen. Praktik-praktik politik yang dilakukan oleh kepengaturan ulang tersebut dapat dibagi menjadi tiga hal.

Pertama, menjalankan Governance. Upaya merealisasikan kebijakan pembangunan pabrik semen dilakukan dengan menerapkan *Governance* sebagai mekanisme manajemen konflik. Dalam *governance* melihat bahwa adanya kepentingan yang beragam di dalam masyarakat dapat didamaikan salah satunya dengan prinsip kemitraan (*partnership*). *Governance* mengandaikan aktor Negara, pasar, dan masyarakat sipil memiliki kekuatan yang berimbang dan peran Negara dilucuti hingga menjadi setara dengan aktor pasar dan masyarakat sipil. Kasus kebijakan pembangunan pabrik semen di Pati menunjukkan bahwa ternyata tidak ada keberimbangan kekuatan, karena aktor Negara dan pasar berselingkuh sejak dalam proses perencanaan untuk memuluskan jalannya investasi dari pabrik semen (baik PT SG & PT SMS). Sedangkan konsep *Governance* yang digunakan telah menyingkirkan masyarakat kontra dalam setiap perundingan pengambilan keputusan. Masyarakat kontra karena mempertanyakan dan dengan keras menolak ekspansi kapital pabrik semen sengaja disingkirkan dalam proses perumusan kebijakan. Sehingga disetiap agenda, mereka tidak dilibatkan, tidak dianggap mitra, dan kehadiran mereka digantikan dengan orang-orang bayaran. Hasil akhir upaya tersebut tidak lain agar proses ekspansi kapital tetap berjalan lancar.

Kedua, menopangkan diri pada klaim kepakaran. Pemerintah Daerah dan perusahaan pabrik semen menggunakan klaim kepakaran untuk membentuk hegemoni mereka kembali. Salah satu praktik klaim kepakaran adalah melalui dalih keahlian dari para pakar dalam menjalankan penelitian ilmiah dan merumuskan kebijakan. Melalui klaim kepakaran maka kekhawatiran, ketakutan, dan keresahan dari masyarakat berupaya untuk diredam dengan meyakinkan mereka bahwa pembangunan pabrik semen ini baik sudah sejak dalam perencanaannya. Kemudian mekanisme Amdal digunakan sebagai rujukan utama yang diklaim dapat mengatasi permasalahan yang akan ditimbulkan dari proyek industri ekstraktif. Amdal yang dibuat para pakar yang memiliki keahlian dalam menjalankan kajian ilmiah ditempatkan sebagai panglima. Sedangkan masyarakat yang menentang upaya ekspansi kapital ditabrakan dengan kajian Amdal yang dianggap netral dan dapat menjawab permasalahan masyarakat yang menentang. Artinya perspektif dan tuntutan dari masyarakat kontra dinilai oleh penguasa sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak rasional, dan tidak keluar dari para pakar atau para ahli.

Ketiga, menjalankan kuasa diskursif yaitu melalui praktik-praktik pembentukan diskursus dan wacana pembenaran. Penguasa-pengusaha berupaya melingkari titik persentuhan antara realisasi ekspansi kapital dan konsesus masyarakat dengan diskursus dan wacana pembenaran. Kuasa diskursif tersebut dijalankan melalui klaim-klaim bahwa pembangunan pabrik semen di Pati sebagai sesuatu yang keluar dari kehendak baik pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Klaim-klaim yang lain juga dimunculkan seperti wacana bahwa “Investasi Pabrik Semen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi”,

“Pembangunan pabrik semen akan meningkatkan PAD”, “Melalui pembangunan pabrik semen akan tercipta *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat”, “Investasi pabrik semen membuka lapangan pekerjaan dan mengentaskan pengangguran”, dan bahwa “Kegagalan pembangunan semen akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat”. Diskursus dan wacana pembenaran tersebut juga didukung dengan wacana bahwa mereka yang menolak pembangunan pabrik semen sebagai komunis, pembangkang, orang tidak berpendidikan, bodoh, dan korban provokasi. Penyematan pemaknaan tersebut adalah upaya untuk mendiskriminasikan para masyarakat kontra.

Aksi-aksi kolektif dilakukan oleh masyarakat kontra untuk menentang kebijakan pembangunan pabrik semen di Pati. Mereka tidak ingin keberlangsungan hidup dan ruang hidup di Pegunungan Kendeng Utara terancam dan diporak-porandakan oleh pabrik semen. Untuk mendorong aksi kolektif yang dilakukan maka tersebutlah gerakan sosial. Masyarakat kontra berdasarkan pengalaman, ikatan sosial, nilai, dan budaya yang dimiliki menggunakan metode tertentu dalam menyokong sikap politik mereka. Masing-masing desa memiliki metode tersendiri dalam menjalankan komunikasi, pengorganisasian, advokasi, dan penolakan. Mereka berupaya membentuk kelompok kontra hegemoni sebagaimana menurut Gramsci dan melakukan perlawanan sebagaimana menurut Foucault.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kontra berupaya membentuk blok historis dalam menentang ekspansi kapital pabrik semen. Mereka membentuk jejaring pergerakan dengan masyarakat sipil yang lain dan

menciptakan berbagai narasi-narasi perlawanan. Gerakan kontra hegemoni berupaya membentuk hegemoni mereka yang bersifat progresif yang dikembangkan melalui persetujuan masyarakat secara demokratis. Pendisiplinan mencoba masyarakat kontra lakukan dengan cara memberikan sanksi sosial bagi mereka yang dianggap bertentangan dengan tujuan untuk mempertahankan ruang hidup mereka. Itu dilakukan agar kepentingan dari kelompok sosial kontra hegemoni yang lebih besar tidak terancam.

Namun gerakan tolak pabrik semen di Pati sampai saat ini masih belum bisa disebut sebagai gerakan kontra hegemoni seperti perspektif Gramsci. Mereka memang telah mampu menyatukan harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan akan tetapi masih bersifat sektoral yang tidak mampu melampaui kepentingan kelompok sosial yang terbentuk yaitu melampaui tuntutan penolakan pabrik semen. Simpul-simpul gerakan yang terbentuk hanya menjalankan politik penolakan pabrik semen tapi disisi yang lain tidak memiliki tujuan politik jangka panjang dan pengembangan ideologi yang berbeda dari ideologi penguasa. Perlawanan yang dilakukan masih tersekat pada aksi-aksi *pemadam kebakaran*. Kesadaran dari masyarakat yang tengah melawan juga belum mencapai kesadaran sejati. Selain itu gerakan yang terbentuk masih belum mampu menjalankan perang posisi terhadap penguasa

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kontra melakukan pertarungan politik dengan juga menciptakan diskursus dan wacana perlawanan tandingan. Mereka melakukan titik pembalikan terhadap argument dan klaim dari penguasa-pengusaha. Pembangunan pabrik semen yang diklaim oleh pemerintah

akan dapat mensejahterakan masyarakat ditentang dengan pengetahuan lokal dan penelitian ilmiah dari para ahli dijejaring pergerakan. Bantuan yang diberikan oleh para ahli, para pakar, para aktivis, dan para akademisi semakin meyakinkan masyarakat bahwa tindakan yang mereka lakukan untuk menolak pabrik semen adalah benar. Mereka tidak lagi *minder* ketika dituduh menolak hanya karena *pokoke*, akan tetapi mereka telah memiliki hasil kajian ilmiah untuk membantah diskursus atau wacana dari penguasa-pengusaha.

Penelitian ini juga mengurai tentang mengapa masyarakat bergerak untuk melawan sesuatu yang mengancam mereka dan juga tentang dinamika perlawanan serta perpecahan dari masyarakat kontra. Itu dilakukan guna untuk menganalisis gerakan kontra-hegemoni yang terbentuk. Perlawanan masyarakat dilakukan secara sadar dan dengan berbagai pertimbangan politik yang sebelumnya dirumuskan. Perpecahan dalam gerakan ini juga menciptakan berbagai metode, strategi, dan taktik dalam melawan kuasa modal secara berbeda-beda.

Sampai saat ini pertarungan yang melibatkan front penguasa-pengusaha dengan front masyarakat kontra terus berlangsung (di Tambakromo & Kayen dalam menentang PT SMS). Walaupun gerakan diakar rumput mengalami perpecahan dan terbentuk beberapa aliansi yang berbeda, namun mereka memiliki kesamaan tujuan yaitu penolakan pabrik semen. Perpecahan tersebut hanya tinggal menunggu momentum untuk dapat menjadi kekuatan besar yang menyatu. Namun semua memang bisa berubah ketika tindakan politis dari penguasa-pengusaha mampu untuk semakin menciptakan retakan-retakan pergerakan.

7.3 Implikasi Teoritis dan Praksis

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa implikasi teoritis dan praksis yaitu antara konsep dan teori yang telah ada dengan realita yang ditemukan di lapangan. Dari berbagai temuan data di lapangan peneliti berupaya untuk menganalisa dan memaparkannya untuk menyanggah beberapa konsep dan teori tertentu. Temuan yang akan dipaparkan bukan sebagai bentuk kebenaran tunggal. Temuan ini diharapkan akan membuka ruang diskursus atau perdebatan tertentu untuk lebih mentransformasikan perkembangan ilmu sosial dan politik serta pergulatan teoritis dan praksis tentang bagaimana kehidupan yang layak dapat dibela dan diperjuangkan. Berikut temuan teoritis dan praksis dalam penelitian ini:

- 1) Kebijakan publik sebagai suatu proses yang bebas nilai dan netral adalah a-historis dan salah kaprah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pabrik semen di Pati telah memunculkan diskursus tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Penolakan keras yang dilakukan oleh masyarakat dilandasi analisa mereka bahwa kebijakan pembangunan pabrik semen tersebut hanya akan menguntungkan segelintir orang yaitu para elit politik dan birokrat. Sedangkan yang dirugikan dan terancam keberlangsungan hidupnya adalah mayoritas masyarakat. Tindakan pemerintah yang memaksakan kebijakan ini menunjukkan bahwa mereka telah membonsai demokrasi untuk kepentingan segelintir orang walaupun itu dihias dengan kehendak mereka untuk memperbaiki kehidupan orang banyak. Pemaksaan kebijakan itu juga menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak bebas nilai dan tidak netral karena dalam realitanya pasti ada yang dipihak dan ada yang

dikorbankan. Langkah pemerintah Kabupaten Pati untuk memberi karpet merah pada investasi menunjukkan keberpihakan mereka.

- 2) Otoritarianisme yang diterapkan untuk menegakan pasar tidak sejalan dengan nilai-nilai ideal kebebasan individu. Dalam cara pandang liberal yang mengedepankan kebebasan individu ternyata memiliki kontradiksi dengan pandangan mereka tentang pasar bebas sebagai mekanisme terbaik berjalannya perekonomian. Studi kasus pembangunan pabrik semen di Pati menunjukkan bahwa otoritarianisme pengambilan keputusan yang dijalankan berseberangan dengan nilai kemanusiaan dan kebebasan individu. Secara teoritis itu menunjukkan bahwa cara pandang liberal tentang pasar, kebebasan individu dan cita-cita kesejahteraan memiliki distorsi yang berujung pada kekuasaan elitis yang menjauhkan dari cita-cita kesejahteraan masyarakat.
- 3) Neoliberalisme tidak selaras dengan sistem demokrasi. Studi pembangunan pabrik semen di Pati yang telah dipaparkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya memberi tempat singgah bagi investasi telah menutup ruang demokrasi. Itu memperlihatkan bahwa neoliberalisme lebih menyukai sistem pemerintahan elitis, karena demokrasi akan menjadi ancaman bagi mereka ketika ada pertentangan terhadap pasar dan akumulasi kapital. Demokrasi yang memberi kesetaraan politik, sedari awal bertentangan dengan kapitalisme yang tidak akan beroperasi tanpa adanya ketimpangan ekonomi. Itu karena seperti yang diungkapkan oleh Soekarno dalam “Mencapai Indonesia Merdeka” bahwa para kapitalis dan elit akan membajak demokrasi dengan kekuatan ekonomi mereka.

- 4) Peran Negara yang dilucuti dalam neoliberalisme agar memberi keleluasaan bagi mekanisme pasar, menjadi kontradiktif ketika proses akumulasi kapital mendapat pertentangan. Disatu sisi negara neoliberal diharapkan untuk menjadi penonton dan hanya berperan untuk menyiapkan panggung bagi berfungsinya pasar, namun di sisi lain negara neoliberal diwajibkan untuk berperan aktif menciptakan suatu iklim bisnis yang kondusif (Harvey, 2010). Studi kebijakan pembangunan pabrik semen di Pati menunjukkan peran Negara yang menjadi pendorong bagi ekspansi kapital dari PT SG dan PT SMS. Sehingga adanya pertentangan dan perlawanan rakyat mencoba untuk diredam dan tidak dihiraukan dalam pengambilan keputusan.
- 5) *Governance* sebagai konsep manajemen konflik dan tata kelola pemerintahan tidak selaras dengan tujuan awalnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan stabilitas sosial. *Governance* justru merupakan unsur sentral dari diskursus neoliberal yang menjadi strategi mengusahakan pembentukan “kesinambungan kekuasaan” yang ditunjukan untuk proses akumulasi (McMurry, 1998). Dalam sejarahnya, *governance* terbentuk dalam konteks kian beragamnya aktor sosial paska reorganisasi neoliberal di akhir 1970an. Keberagaman aktor sosial memerlukan sistem manajemen konflik yang baru demi membangun kohesi sosial bagi lancarnya akumulasi capital (De Angelis, 2005). Studi konflik pembangunan pabrik semen di Pati menunjukkan bahwa metode kemitraan dalam *governance* telah mengeksklusi aspirasi masyarakat kontra yang secara sadar menentang akumulasi kapital.

- 6) Pendekatan foucauldian melihat bahwa kepengaturan (*governmentality*) merupakan “pengarahan perilaku” yang membentuk hegemoni yang tidak disadari oleh mereka yang terhegemoni. Namun dalam studi kasus konflik pembangunan pabrik semen di Pati menunjukkan bahwa upaya kepengaturan ulang juga dibalut dengan tindakan koersif. Itu menunjukkan bahwa proses hegemoni dimulai dengan dominasi sebelum terjadi “kepemimpinan intelektual dan moral”. Hegemoni progresif yang mencoba dibangun oleh masyarakat kontra juga dilakukan melalui tindakan koersif dan pendisiplinan.
- 7) Pendekatan Foucault tentang kepengaturan memang telah mampu untuk melihat watak dan tindakan kekuasaan namun kurang mampu menyermati perlawanan dari masyarakat kontra. Kepengaturan lebih bergulat tentang kuasa diskursif sementara perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya sebatas dalam ranah diskursif. Akan tetapi mereka melakukan aksi dan mobilisasi massa. Itu yang membuat kemenangan gerakan rakyat menjadi mungkin. Sementara ketika hanya bergelut di pertarungan diskursus maka akan mendistorsi gerakan, karena penguasa pada kenyataannya tidak hanya melakukan pertarungan diskursus akan tetapi juga melakukan tindakan koersif dalam meredam pergerakan massa. Selain diabaikannya pendekatan kelas dalam marxisme membuat pendekatan dari Foucault menjadi terdistorsi dalam melihat ekonomi politik kekuasaan.
- 8) Gerakan kontra-hegemoni yang dibangun masyarakat kontra memang belum mampu menjalankan perang posisi, namun mereka telah mampu

menghancurkan politik massa mengambang warisan orde baru.

Masyarakat kontra mulai sadar bahwa mereka harus bergerak untuk memperjuangkan kehidupan mereka yang tengah terancam upaya pembangunan pabrik semen.